

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat Muslim. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat

meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.

Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan.

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaannya telah menyebar di semua propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹

BMT Al-Amanah adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (*lost and profit shaing*). Lembaga tersebut didirikan oleh tiga komponen utama meliputi: komponen masyarakat wilayah Situraja, Yayasan Dompot Dhuafa Republika Jakarta (kini baznas DD Republika), dan Pondok

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 191

Pesantren Miftahussalam. BMT ini beralamat di Jl. Raya Situraja No. 257 Situraja Sumedang.²

Salah satu produk yang di jalankan BMT Al-Amanah yaitu pembiayaan *murabahah*, yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³ Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini, sebelum terjadinya akad *murabahah*, nasabah/anggota diharuskan terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* sebagai perwakilan dari pihak BMT untuk membeli barang yang di inginkan nasabah kepada suplier/pemasok, dalam pengambilan barang, pihak I mawakilkan kepada pihak II untuk pembelian barang dimaksud dengan akad *wakalah* yang akan di buat secara tersendiri (pasal 2 kontrak *murabahah*), penyerahan barang secara tangguh sampai pihak II, sebagai pihak I sebagaimana dalam pasal 2 membeli barang-barang tersebut.⁴ Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* yang dijalankan di BMT Al-Amanah ini biasa disebut dengan piutang *murabahah bil wakalah* yaitu pinjaman untuk pembelian barang- barang modal atau barang kebutuhan rumah tangga.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amanah dimulai dengan pengajuan proposal (misalnya untuk pembelian *laptop*) oleh calon nasabah. Kemudian pihak BMT akan mengkaji secara cermat dan penuh ketelitian terhadap karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah dinilai layak maka kedua pihak dapat melakukan kontrak *murabahah*, tetapi nasabah diharuskan terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* sebagai perwakilan BMT untuk membeli

² Dokumen, Profil BMT Al-Amanah.

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik* . Jakarta : Gema Insani Press, 2001. hal. 101.

⁴ Dokumen tentang Akad Piutang Murabah bil *Wakalah* Pasal 2-3BMT Al-amanah .

barang dari suplier yang harus ditentukan oleh nasabah itu sendiri dan BMT menyerahkan sejumlah dana yang disepakati.⁵

Demikian juga halnya dengan BMT Al-Amanah, dalam menjalankan kegiatannya sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbasis mensejahterakan ekonomi untuk kemaslahatan ummat, menerapkan pula sistem perekonomian yang serupa dengan pembiayaan *murabahah*, yaitu piutang *murabahah bil wakalah*.

Dalam pelaksanaannya, jika ada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang diterapkan di BMT Al-Amanah diharuskan melakukan pengajuan proposal terlebih dahulu. Kemudian pihak BMT akan mengkaji secara cermat dan penuh ketelitian terhadap karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah dinilai layak maka kedua pihak dapat melakukan kontrak *murabahah*, tetapi sebelumnya nasabah akan diberikan lembaran akad *wakalah* sebagai pemberian kuasa dari pihak BMT Al-Amanah kepada nasabah untuk membeli objek jual-beli *murabahah* dari suplier yang ditentukan oleh nasabah itu sendiri dalam proposal pengajuan, dan ketika itu juga pihak BMT sekaligus menyerahkan sejumlah dana yang disepakati.⁶

Dengan kontrak *murabahah bil wakalah* tersebut maka BMT dan nasabah melakukan akad *murabahah* diwaktu yang bersamaan dengan akad *wakalah*. Selain itu, BMT memposisikan nasabah sebagai wakil BMT dalam pembelian objek jual-beli *murabahah* tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar seharga barang beserta keuntungan (margin) yang disepakati dengan cara diangsur ke

⁵ Wawancara dengan Dedi Suardi, S.Sos selaku Manager BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

⁶ Prosedur pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Amanah.

BMT Al-Amanah. Untuk lebih jelasnya mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dijalankan di BMT Al-Amanah dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Dalam pembelian barang tersebut, maka BMT dan nasabah melakukan akad *murabahah bil wakalah* (pemberian kuasa untuk membeli objek jual-beli *murabahah*) diwaktu yang bersamaan dengan akad *wakalah*. Dengan kontrak *murabahah bil wakalah* tersebut maka BMT memposisikan nasabah sebagai wakil BMT dalam pembelian *barang* tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar seharga barang beserta keuntungan (margin) yang disepakati dengan cara diangsur ke BMT Al-Amanah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa dalam produk *murabahah* bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah atas nama bank (BMT) secara sah dan bebas riba selanjutnya menawarkan aset (barang) tersebut kepada nasabah. Salah satu dari syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli (*ma"qud alaih*) adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang milik sendiri, tidak sah menjual barang-barang yang belum menjadi miliknya⁷. Oleh karena itu sebelum melakukan akad jual beli *murabahah* dengan nasabah, secara prinsip barang tersebut (objek jual beli) harus sudah menjadi milik bank dengan kontrak *murabahah* terlebih dahulu, kemudian menuntaskan perjanjian *wakalah*..

Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *murabahah* dalam perbankan Islam dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 73

(bank) dan dimiliki olehnya dan penjual (bank) seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah).⁸

Dari contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa adanya ketidaksinambungan antara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dijalankan BMT Al-Amanah dengan teori Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari permasalahan di atas yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang”.

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses akad pembiayaan *murâbahah bil wakalah* di BMT Al-Amanah?
2. Bagaimana relevansi fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah bil wakalah* di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembiayaan *murâbahah bil wakalah* di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.139.

2. Untuk mengetahui relevansi fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah bil wakalah* di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

D. Kerangka Pemikiran

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong-menolong, dan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemashlahatan manusia di dunia.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut, telah disyariatkan dengan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan sebagaimana ditandakan dalam Q.S Al-Maidah: 2 :

.....

“Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”.⁹

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 1129

penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkanlah suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Salah satu bentuk perdagangan berupa pembiayaan yang dapat diaflikasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah ataupun secara mandiri, yaitu *Al-murabahah*.

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* (keuntungan), ia di bentuk dengan wazan (pola pembentukan kata), *mufa'alat* (dalam ilmu bahasa arab, *sharaf*) yang artinya menunjukkan „saling“. Oleh karena itu, arti *murabahah* secara bahasa adalah saling memberi keuntungan¹⁰. Sedangkan menurut istilah, *murobahah* memiliki berbagai macam definisi salah satunya menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya menjelaskan bahwa *murobahah* yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk dari *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* selalu ditentukan berapa jumlah *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).¹¹

Karena dalam definisi disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murobahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan

¹⁰ Jaih Mubarak, . *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indoneasia* . Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2004. hal. 61.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*. Jakarta : Gema Insani Press, 2011. hal.113.

pada biaya tersebut. Misalnya si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.¹² Sayyid Sabiq mendefinisikan *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.¹³

Hal ini untuk menunjukan keseriusan pembeli. Jika kemudian pembeli membatalkan pesannya, uang muka ini bisa digunakan untuk mengganti kerugian penjual (bank). Bila uang muka kecil di bandingkan jumlah kerugian penjual, maka penjual boleh memintanya kekurangannya. Begitu juga sebaliknya jika kelebihan, pembeli berhak atas kelebihan itu.¹⁴

Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori penjualan dengan pembayaran tunda. Meskipun tidak didasarkan pada teks al- Quran dan Sunnah, namun dalam kajian fiqh Islam jenis transaksi ini dapat dibenarkan. Bank-bank Islam telah menggunakan kontrak *murabahah* dalam kativitas pembiayaan mereka dimana barang-barang dilibatkan dan bank telah memperluas cakupan dan tingkat penggunaannya. Pembiayaan semacam ini sekarang telah mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank Islam berkat kemampuannya untuk memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka dari investasi bank, sangat mirip dengan keuntungan yang ditetapkan di muka pada bank-bank berbasis bunga. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan

¹² Ibid. hal.114.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah / Fiqh As-Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, J. XII, 1987,. hal. 85.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam dan Analisis dan Keuangan* . Jakarta : Gema Insani Press, 2011. hal.115.

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana.¹⁵

Wakâlah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan¹⁶ *Wakâlah* menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut: menurut Malikiyah *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak atau kewajiban, dia yang mengelola pada posisi tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut Hanafiyah *al-wakalah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Menurut Syafi'iyah *al-wakalah* ialah suatu *ibrah* seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.

Dewan Syariah Nasional adalah badan/lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. hal. 105

¹⁶ Fatwa No. 10 DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

¹⁷ Abdurrahman, al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-„Araba“ah*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr. 1986. Hal.167

Quran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli *murabahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadis. Menurut Al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang *murabahah*, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadis yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah. *Wahbah az-Zuhaili* mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:

1. Dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
2. Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

Oleh karena itu, dasar hukum *murabahah* menurut ijma¹⁸ para ulama adalah umat islam telah berkosensus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual-beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Fatwa dari Bahasa Arab نوى artinya nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. adapun yang dimaksud secara istilah adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.¹⁹

Dewan Syariah Nasional adalah badan/lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan

¹⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hal. 23.

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses pada 21/1/2013

masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor BMT Al-Amanah beralamat di Jl. Raya Situraja No. 257 Situraja Sumedang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah faktor geografis yang sangat memungkinkan bagi penulis agar bisa lebih efektif dan efisien dalam serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi. Langkah-langkah penelitian yang lazim juga disebut prosedur penelitian atau metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Untuk menentukan masalah penelitian skripsi yang berjudul implementasi akad *murabahah* di bmt situraja sumedang maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam tentang proses pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al- Amanah dan untuk mengetahui relevansi antara aplikasi pembiayaan *murabahah* yang dijalankan BMT Al-Amanah dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. metode deskriptif diartikan “Suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu”. Metode ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Ada juga yang

berpendapat bahwa metode deskriptif adalah sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.²⁰

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen, wawancara, buku-buku, uflet dan lain-lain
- b. Sumber data skunder, yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku tentang muamalah, buku-buku perbankan syariah, buku-buku fatwa DSN, dan artikel dari media elektronik (internet).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 195), wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan

²⁰ Suryana, Yaya dan Priatna, Tedi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Azkia Pustaka Utama. 2007. Hlm. 103

dengan cara Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis wawancara yang penyusun pilih adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Terbuka maksudnya para subjek tahu bahwa ia sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Sedangkan terstruktur adalah pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan²¹. Adapun yang menjadi informan adalah sebagai pengurus dan karyawan yang memiliki informasi tentang permasalahan penelitian.

- b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa diktat, catatan, arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah pendirinya, susunan pengurusan, program kegiatan dan produk-produk yang dipasarkan BMT Al-Amanah situraja Sumedang.
- c. Studi pustaka

Studi pustaka ini digunakan sebagai pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh pembendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutif langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000. hal. 137-138.

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah di analisis.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG